

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sistem akuntansi merupakan sebuah sistem yang memproses data dan transaksi untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Menurut Sutabri (2004 : 4) sistem akuntansi merupakan supersistem yang terdiri dari sistem akuntansi pertanggungjawaban dan sistem pemrosesan transaksi. Sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan dan dapat dijadikan pedoman dalam penyajian informasi yang diperlukan oleh berbagai pihak dengan berbagai kepentingan (*general perposes financial statement*). Sistem akuntansi memberikan landasan tentang prosedur, teknik, dan metode yang layak akan merekam segala peristiwa penting.

Menurut Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal (70) ayat (1), bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengelolaan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian uang serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum dan yang dilakukan dengan cara manual maupun dengan cara aplikasi. Hal ini didukung dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan sistem tata kelola pemerintah yang baik (*good gevernance*) yang di tandai dengan meningkatkan kemandirian

daerah, adanya transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah daerah yang semakin refonsif terhadap masyarakat, meningkatnya prestasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatnya efensiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta meningkatnya demokratisasi di daerah Mahmudi (2009 : 11), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi tujuan spesifik dari masing - masing kelompok pengguna Tanjung (2011 : 10).

Untuk bisa menjalankan sistem akuntansi keuangan daerah dengan baik harus didukung oleh organisasi yang memiliki perilaku yang baik dan dapat mempertanggungjawabkan penyajian laporan keuangan secara akrual dan berkualitas agar pemanfaatan dari laporan keuangan ini benar-benar akan lebih transpransi. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyelidiki bagaimana individu-individu, kelompok-kelompok, serta struktur yang mempengaruhi dan di pengaruhi dalam organisasi, bagaimana orang tersebut di bentuk dengan sikap yang sering dilakukan pada organisasi bisnis, perilaku organisasi lambat laun akan diterapkan terhadap masalah-masalah di tempat kerja, seperti ketidakhadiran (*absenteeism*), tingkat perputaran karyawan (*turnover*), produktifitas, motivasi, kelompok kerja, dan kepuasan kerja. Perilaku organisasi ini sangat membantu mereka dalam mengelola organisasinya sehingga lebih efektif Lubis (2009 : 49).

Faktor keperilakuan organisasi dalam hal ini mengacu pada tiga faktor antara lain dukungan atasan di artikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan organisasi dan menyediakan sumber daya yang di perlukan untuk menunjang kebutuhan yang akan di butuhkan oleh pegawai. Kejelasan tujuan di definisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di semua level organisasi yang lebih maju dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang ada. Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem yang berlaku dan membantu untuk bisa mengoperasikan sistem akuntansi keuangan daerah yang ada pada organisasi.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah di perlukan sistem akuntansi keuangan yang transparan. Oleh karena itu pemanfaatan sistem ini sangat membantu untuk bisa mempermudah dalam pengelolaan keuangan dan mempercepat akses pencatatan, pembukuan dalam organisasi pemerintahan. Hal ini tidak lepas dari perilaku organisasi mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan menetapkan serta melakukan kebijakan dan pertanggungjawaban.

Terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya diantaranya Nurlaela dan Rahmawati (2010), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perkembangan dan dukungan dari Keperilakuan Organisasi berpengaruh terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan telah terjadi pada Pemerintah SUBOSUKAWONOSRATEN. Selanjutnya penelitian Supartini

(2010) menunjukkan bahwa variable independen yaitu Kekuasaan Pada penggunaan sistem Keuangan daerah dan variable dependennya berpengaruh terhadap Perilaku Manajerial secara positif terhadap informasi Keuangan Daerah Lebih lanjut hasil penelitian Zahro (2010), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam meningkatkan Keperilakuan Organisasi yaitu berpengaruh Dalam Implementasi sistem akuntansi Keuangan Daerah pada pemerintah yang ada pada Kota Madiun. Sedangkan menurut penelitian Alleyne And Lavine (2013), hasil penelitian ini yaitu Sikap, harapan kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial dan self-efficacy akan memiliki efek yang signifikan dan positif terhadap niat perilaku untuk menggunakan, dan memfasilitasi kondisi dan niat perilaku akan memiliki efek yang signifikan dan positif terhadap frekuensi penggunaan (penggunaan aktual).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lebih memfokuskan pada variable keperilakuan organisasi dengan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Dalam penggunaannya, sistem akuntansi keuangan daerah memiliki kelemahan yaitu sering terjadinya gangguan jaringan yang dapat membuat sistem error pada saat digunakan. Hal tersebut dikarenakan kurang fasilitas jaringan yang di sediakan. Kelemahan lain yaitu dalam pelaporan laporan keuangan sering tidak tepat waktu karena kurangnya tanggungjawab dalam mencapai tujuan organisasi dalam hal ini ketepatan waktu dalam melaporkan laporan keuangan. Kurangnya pelatihan untuk para pegawai khususnya

pelatihan tentang sistem akuntansi keuangan daerah. Dari kelemahan – kelemahan ini dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku organisasi sebagai satuan kerja pemerintah yang menggugurkan sistem akuntansi keuangan daerah.

Hal inilah yang menginspirasi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan lebih fokus pada **“PENGARUH FAKTOR KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah penelitian, sebagai berikut :

1. Kurangnya keterlibatan atasan dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam hal ini keterbatasan jaringan yang kuat untuk kebutuhan yang diperlukan pegawai.
2. Pelaporan laporan keuangan sering tidak tepat waktu karena kurangnya tanggungjawab dalam mencapai tujuan organisasi.
3. Kurangnya pelatihan untuk para pegawai khususnya pelatihan tentang sistem akuntansi keuangan daerah.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian ini yang dikemukakan di atas, maka penelitian merumuskan permasalahan yaitu :

Seberapa besar pengaruh dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) ?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu ;

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan untuk dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya terkait dengan akuntansi keuangan daerah. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk diperbandingkan dengan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada pegawai pengguna sistem akuntansi keuangan daerah. Khususnya pegawai yang ada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.